**BAB II**

# TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari isitilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit.[[1]](#footnote-1) Strafbaar feit,* terdiri dari tiga kata, yakni *straf baar* dan *feit.* Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.[[2]](#footnote-2)

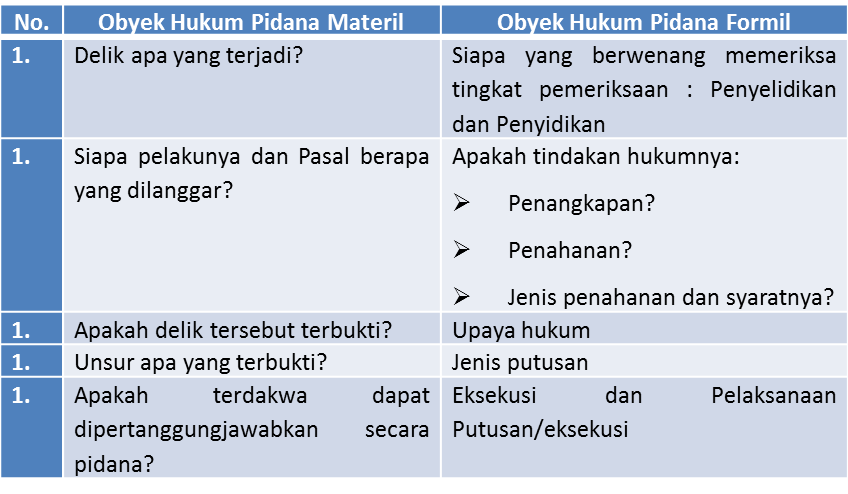
Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.[[3]](#footnote-3) Van Hamel merumuskan istilah *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.[[4]](#footnote-4) Kemudian Vos menjelaskan, *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.[[5]](#footnote-5) Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah *perbuatan pidana* bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.[[6]](#footnote-6)

Adapun pengertian tentang *strafbaar feit* sebagaimana diuraikan di atas, bahwa diantara sarjana hukum terdapat dua pandangan yang berbeda dalam hal merumuskan suatu *strafbaar feit* atau *delict,* pandangan pertama merumuskan delik sebagai suatu kesatuan bulat, sehingga tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat disatu pihak dan pertanggung jawaban dilain pihak. Kemudian pandangan yang kedua yakni pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak. Adapun cara merumuskan delik dalam penelitian ini, penulis menggunakan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana (*actus reus*) dengan pertanggungjawaban (*mens rea*).[[7]](#footnote-7)

1. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Didalam Bab I buku kedua disebutkan yaitu Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasaranya adalah keamanan negara.[[8]](#footnote-8)



Berkaitan dengan kasus yang hendak dibahas oleh penulis yaitu tentang pembunuhan yang di dasarin rasa sakit hati merupakan delik materiil karena delik pembunuhan yang di dasarin rasa sakit hati memandang akibat yang dilarang dari perbuatan pelaku kejahatan. Disamping itu pembunuhan berencana termasuk delik *dolus* sebagaimana diuraikan di atas yang dalam rumusannya terdapat unsur kesengajaan.

B. Pencurian Pemberatan

Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat.

Tindak pidana pencurian dalam KUHP termasuk kelompok jenis kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian dapat dibagi atas jenis pencurian dalam bentuk pokok, pencurian dalam pemberatan dan pencurian dalam bentuk peringanan. Selain dalam bentuk pokok, pencurian dalam bentuk pemberatan dimaknai bahwa dalam tindak pidana pencurian tersebut selain mengandung unsur pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP juga mengandung unsur-unsur tambahan yang secara limitatif disebutkan dalam perumusan tindak pidananya sebagai unsur yang bersifat memberatkan. Demikian juga pada tindak pidana pencurian dalam bentuk peringanan mengandung unsur-unsur tambahan berupa unsur yang bersifat meringankan.

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“

Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan atau disebut pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan kualifikasi dan merupakan suatu pencurian pada unsur-unsur memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu menyebabkan \bersifat lebih berat yang ancaman pidananya lebih berat dari pada pencurian biasa. Pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana dengan pencurian kualifikasi ini diawali yang cara membuktikan pencurian pada bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.

Mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Secara lengkap isi dari Pasal 365 KUHP :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.
2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
3. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
4. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Jika si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kuncil palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
6. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
7. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
8. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan 3.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dicermati ketentuan Pasal 365 ayat (1)

KUHP di atas, ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
2. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pelanggaran terhadap ayat (1), ancaman pidananya adalah “hukuman

penjara selama-lamanya sembilan bulan. Sedangkan dalam Pasal 365 Ayat (2) huruf a:

1. Perbuatan pencurian dilakukan pada waktu malam;
2. Di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;
3. Dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Pasal 365 Ayat (2) huruf b: “Perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”. Selanjutnya Pasal 365 Ayat (2) huruf c: “Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Dan Pasal 365 Ayat (2) huruf d: “Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat”.

Pelanggaran terhadap ayat (2), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 365 Ayat (3): “Perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati”. Pelanggaran terhadap ayat (3), ancaman pidananya adalah “hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 365 Ayat (4) menyebutkan:

1. Perbuatan pencurian menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati
2. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
3. Disertai kekerasan/ancaman kekerasan,
4. Mengakibatkan ada orang mati.

Pelanggaran terhadap ayat (4), ancaman pidananya adalah “hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pasal 365 KUHP adalah mengatur tentang “pencurian dengan kekerasan”.[[9]](#footnote-9) Menurut Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan” menurut pasal ini ialah: “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”.

Pingsan artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya”, umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Namun perlu dicatat bahwa mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan “mengancam dengan kekerasan", sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang “melakukan kekerasan” bukan membicarakan tentang “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”.

Pengertian kekerasan dalam konteks Pasal 365 KUHP termasuk pula “mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar dan sebagainya. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah, tidak masuk di sini, karena kekerasan merusak itu tidak dikenakan pada orang.15

Ancaman hukuman diperberat, jika pencurian dengan kekerasan ini disertai dengan salah satu dari syarat-syarat tersebut pada sub 1 - 4. Rumah sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah

Pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang disekelingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Dalam hal ini si pencuri harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk di sini. Membongkar sama artinya dengan merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedangkan engsel tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar.

Tentang memanjat, Pasal 99 KUHP menentukan: “Yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup Hal. Perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu. Selain itu, pakaian jabatan palsu (*valsch costuum*) sama dengan costuum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikulir.16

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit dan unsur-unsur dalam arti luas, Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif. Yang disebut unsur obyektif adalah perbuatan manusia, pada umumnya tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif, namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan.

Unsur-unsur tersebut juga pada Pencurian dalam bentuk pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur obyektif
2. Barang siapa, yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana. Biasa diartikan dalam artian manusia, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku pencurian merupakan suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku.
3. Mengambil artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain.
4. Suatu benda artinya ada benda yang diambil pelaku. Adapun yang dimaksud dengan benda itu harus berharga dan bernilai bagi korban.
5. Sebagian/seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetap merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian.
6. Unsur subyektif

Pencurian dalam tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok, akan tetapi pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum pada Pasal 363 KUHP yang bersifat memberatkan pelaku, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pidana pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selama- lamanya tujuh tahun. Apabila tidak dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, jika harga barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pencurian ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau piana denda dua ratus lima puluh rupiah tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dua puluh lima rupiah

Pencurian dengan unsur kekerasan termasuk suatu pencurian dengan unsur-unsur memberatkan pula, yaitu yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Menurut Pasal 367 ayat (2) KUHP, apabila pelaku atau pembantu dari pencurian dari Pasal 362, Pasal 364, dan Pasal 365 adalah suami atau istri dari si korban, dan mereka dibebaskan dari kewajiban tinggal bersama, atau keluarga sedarah semenda, boleh dilakukan penuntutan atas pengaduan si korban pencurian, aduan pada pencurian dalam keluarga ini termasuk delik aduan relatif.

1. Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan tetapi beda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.
2. Delik materiil di mana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, kita harus menggunakan ajaran hubungan kausal untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

Unsur subyektif ialah dilakukan dengan kesalahan, delik yang mengandung unsur memberatkan pidana apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHP maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi: “Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 No. 1-4”.

Orang yang mampu bertanggung jawab tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila perbuatan manusia diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Pengertian kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik di lihat dari sudut umum maupun dari orangnya.

Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Selain pendapat dari para ahli, banyak juga teori hukum yang mengajarkan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi dia tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*).

Sepintas kelihatannya pernyataan tersebut saling bertentangan satu sama lain, tetapi sebenarnya tidak saling bertentangan, karena demikianlah salah satu sifat hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung hukum kepastian dan prediktabilitas sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain pihak haruslah dinamis sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

C. Penyertaan/*Deelneming*

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal-hal tertentu dapat juga dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan dari beberapa orang di dalam suatu tindak pidana merupakan bentuk kerjasama yang berlainan sifat dan bentuknya sesuai dengan perannya masingmasing. Dalam sistematikan KUHP, penyertaan diatur dalam Buku I Ketentuan Umum Bab V Pasal 55 sampai Pasal 63 KUHP yang berjudul Turut Serta Melakukan Perbuatan yang Dapat Dihukum. Suatu pernyataan awal yang paling mendasar adalah apakah yang dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*).[[10]](#footnote-10) Moejatno merumuskan, ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Menurut Moejatno, tidak semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana dapat dinamakan peserta dalam makna Pasal 55 dan 56 KUHP. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk masing-masing jenis penyertaan tersebut, di luar jenis atau bentuk-bentuk penyertaan yang diatur dalam KUHP tidak ada peserta lain yang dapat dipidana.

S. R. Sianturi memberikan penafsiran, makna dari istilah penyertaan ialah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.[[11]](#footnote-11) Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengartikan penyertaan sebagai turut bertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Penyertaan adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang.

Tersangkutnya ini mempunyai bentuk yang bermacam-macam dalam KUHP:

1. *Plegen* (yang melakukan);
2. *Doenplegen* (yang menyuruh melakukan);
3. *Medepleger* (yang turut melakukan);
4. *Uitlokking* (yang membujuk untuk melakukan);
5. *Medeplichting* (yang membantu melakukan).[[12]](#footnote-12)

Penyertaan ini dibagi dalam beberapa bentuk gunanya untuk menentukan pertanggungjawaban setiap peserta terhadap delik yang dilakukan.[[13]](#footnote-13) Berdasarkan hal tersebut, dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan *(pleger)* dan mereka yang turut serta melakukan *(medepleger)* mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi.[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan hal tersebut, maka bentuk penyertaan dalam hukum pidana yang digolongkan tersebut dijabarkan lebih lanjut, diantaranya:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana *(pleger*)

Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.[[15]](#footnote-15)

Dari pendapat tersebut, untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan *(pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menetukan terwujudnya tindak pidana, b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

1. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*) Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.[[16]](#footnote-16)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada Bukunya Adami Chazawi yang berdasarkan keterangan yang diktip dalam MvT WvS Belanda, yang menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.[[17]](#footnote-17)

1. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai manus ministra sedangkan orang yang memperalat disebut sebagai manus domina juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).[[18]](#footnote-18)

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperlalat orang lain:

1. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi leh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
2. Orang lain tersebut tidak bertanggungj awab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
3. Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh[[19]](#footnote-19)
4. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger* ).29

1. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabaklan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.[[20]](#footnote-20) [[21]](#footnote-21)

1. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld)* di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.[[22]](#footnote-22)

1. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

1. Harus adanya keijasama secara fisik *(pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan.
2. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).[[23]](#footnote-23)

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.[[24]](#footnote-24) Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana *(pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwuudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

1. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.[[25]](#footnote-25)

**D*. Concursus***

Istilah *concursus/samenloop* ini ada yang menerjemahkan sebagai “gabungan beberapa tindak pidana”, “rentetan beberapa peristiwa pidana”. Di samping itu ada juga memakai istilah “perbarengan dari beberapa perbuatan pidana”. Suatu *samenloop van strafbare feiten* atau suatu gabungan dari perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum itu hanya ada apabila perbuatan- perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat suatu putusan hakim yang telah mengadili satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan tersebut.[[26]](#footnote-26)

Ajaran tentang *concursus/samenloop* ini merupakan ajaran yang tersulit dalam ilmu hukum pidana, sehingga orang tidak akan dapat memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan *samenloop van strafbare feiten* itu sendiri, maupun permasalahannya apabila orang tidak mengikuti perkembangan paham mengenai “*feit*” yang terdapat dalam rumusan yang mengatur masalah *concursus/samenloop* itu, khususnya dalam rumusan Pasal 63 ayat (1) KUHP. Adakalanya “*feit*” diterjemahkan dengan "perilaku", meskipun dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Sementara adakalanya juga “*feit*” diterjemahkan dengan "perbuatan" dengan alasan "*feit*" sebagai suatu "*materiele feit*” atau “*materiele handeling*” (perbuatan nyata).

Berkenaan dengan pemidanaannya ini, KUHP mengenal 4 sistem yaitu: [[27]](#footnote-27)

1. *Absorptie stelsel;*
2. *Cumulatie stelsel;*
3. *Verscherpte absorptie stelsel;*
4. *Gematigde cumulatie stelsel.*

Singkatnya, stelsel nomor 1 dan 2 disebut stelsel pokok, sedangkan nomor 3 dan 4 disebut *Tussen Stelsel* (stelsel tengah). Adapun penjelasannya adalah:

1. *Absorptie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri atau berbeda-beda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana yaitu pidana terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik. Contoh: A melakukan 3 macam delik yang masing-masing dari perbuatan itu diancam dengan pidana penjara 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Menurut sistem ini pidana yang boleh dijatuhkan hanya satu pidana yang terberat, yaitu 3 tahun penjara. Pidana terberat ini seolah-olah menelan atau menyerap pidana lainnya yang lebih ringan.

1. *Cumulatie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut sistem ini tiap-tiap pidana yang diancam terhadap tiap-tiap delik semua dijatuhkan (*cumulatie* = menjumlahkan) Contoh: Kalau diambil contoh di atas maka menurut sistem ini terhadap A yang melakukan 3 delik yang masing-masing diancam pidana sendiri-sendiri itu dikenai pidana 6 tahun yaitu 1 tahun +2 tahun +3 tahun.

1. *Verscherpte absorptie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing- masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat akan tetapi ditambah 1/3 nya. Contoh: Kalau menurut contoh di atas maka menurut stelsel ini Ia dijatuhi pidana terberat ditambah 1/3 nya yaitu 1 tahun. Jadi jumlah pidana seluruhnya adalah 4 tahun.

1. *Gematigde cumulatie stelsel*

Seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan delik berdiri sendiri yang diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya akan tetapi jumlah dari pada pidana itu harus dikurangi yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana yang terberat ditambah dengan 1/3 nya. Contoh: Dari contoh di atas mestinya ia dijatuhi pidana 6 tahun akan tetapi jumlah itu dikurangi sehingga pidana itu dibatasi tidak lebih dan 4 tahun yaitu 3 tahun + 1/3 nya.[[28]](#footnote-28)

Pada dasarnya yang dianut oleh KUHP ialah stelsel ke-3 dan ke-4 (*stelsel* tengah/tussen *stelsel*), akan tetapi di samping itu menggunakan juga *stelsel* ke-1 dan ke-2 (*stelsel* pokok walaupun hal ini digunakan dalam beberapa hal saja). Oleh karena *concursus/samenloop* ini berhubungan erat dengan masalah penjatuhan pidana, maka dapat dikatakan bahwa *concursus/samenloop* oleh KUHP dianggap suatu keadaan yang memberatkan pidana, sekalipun penulis beranggapan bahwa *concursus/samenloop* justru suatu keadaan yang meringankan pidana. Hal ini disebabkan dari beberapa perbuatan pidana yang dilakukan tersebut ancaman pidananya tidak bersifat kumulatif dalam arti ditambahkan secara ekstensif.[[29]](#footnote-29)

1. Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 67 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid,* hlm. 69 [↑](#footnote-ref-2)
3. Andi Hamzahlm 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta.Rineka Cipta. hlm. 88 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, hlm. 88 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, hlm. 88 [↑](#footnote-ref-5)
6. Moeljatno. *opcit*. hlm. 59 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*. hlm. 88-89 [↑](#footnote-ref-7)
8. Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 58 [↑](#footnote-ref-8)
9. Basri, Heni Hendrawati, dkk, “Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”, Jurnal Hukum, 2015, Hal. 157. [↑](#footnote-ref-9)
10. Andi Sofian dan Nur Azisa. 2018. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, Hal 176. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid.,* Hal 177. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, dkk. *Op. Cit.*, Hal 129. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-13)
14. Chiarul Huda, *Loc. Cit*. [↑](#footnote-ref-14)
15. Adami Chazawi. 2019. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3).* Jakarta: Rajawali Pers, Hal. 85. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII-Press, Hal. 115. [↑](#footnote-ref-16)
17. Adami Chazawi. *Op. Cit.*, Hal. 87-88. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.,* Hal. 89. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid.,* Hal. 90. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid.,* Hal. 91. [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid.,* Hal. 92. [↑](#footnote-ref-22)
23. HLMM. Rasyid Ariman & Fahmi Raghib. 2018. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, Hal 127. [↑](#footnote-ref-23)
24. Adami Chazawi. *Op. Cit.*, Hal. 99. [↑](#footnote-ref-24)
25. *Ibid.*, Hal. 112. [↑](#footnote-ref-25)
26. Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Jakarta : Deepublish, Hal 98. [↑](#footnote-ref-26)
27. Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan Dan Peringatan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas* (*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, Hal. 131. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.,* Hal 99. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid.,* Hal 100. [↑](#footnote-ref-29)